BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana strategis merupakan suatu proses Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2015 – 2019 berpedoman pada Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019.

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan perencanaan jangka panjang dan bersifat global yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro, operasional, dan berjangka pendek dalam satu tahunan berupa Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019

Reviu Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2015 – 2019 berpedoman pada Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019.

A.1. Tujuan

Perencanaan strategis adalah merupakan produk melalui langkah-langkah rumusan strategis guna mencapai hasil yang hendak diwujudkan dalam kurun waktu tertentu, yakni tahapan-tahapan kurun waktu satu hingga lima tahun dengan memperhitungkan

potensi, peluang dan kendala yang ada atau rencana strategis (renstra) harus mengandung tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan agar program-program menjadi skala prioritas dan bukan skala kebutuhan.

Adapun Tujuan yang ingin diwujudkan adalah Meningkatkan Kualitas Sarana Dasar Permukiman dengan indikator Tingkat Kemiskinan dan Indek GINI.

A.2. Sasaran

Memperhatikan adanya permasalahan mendasar, potensi, peluang. Kebutuhan akan partisipasi semua pihak dan teknologi yang tersedia maka sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Meningkatkan Kualitas dasar Permukiman dengan indicator Persentase Rumah Tangga yang terlayani Infrastruktur Dasar

A.3. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam penataan dan pengelolaan Perumahan dan Kawasan Permukiman diharapkan pada aspek-aspek penunjang kondisi wilayah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pengembangan Perumahan sebagai wujud ketersediaan hunian bagi masyarakat .
2. Peningkatan Lingkungan Sehat Permukiman sebagai wujud Kenyamanan masyarakat untuk hidup sehat.

Kebijakan-kebijakan dan program yang telah ditetapkan terlebih dulu akan dijabarkan secara strategis pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) guna mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

A.4. Prioritas Pembangunan

Guna mencapai tujuan dan sasaran Organisasi dalam rangka mewujudkan visi misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

yang telah ditentukan, Oleh karena itu, ditetapkan prioritas pembangunan yaitu :

1. Terpenuhinya Perumahan di wilayah Kabupaten Lumajang;
2. Meningkatnya Lingkungan sehat Kawasan Permukiman;
3. Terpenuhinya Ketersediaan Hunian untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);

A.5. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah representasi dari berbagai macam sasaran sejumlah prioritas kebijakan, dan merupakan akumulasi interaksi antar masing-masing indikator sasaran prioritas kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman hingga memunculkan indikator yang paling diperhitungkan. IKU dimaksudkan untuk mengukur capaian sasaran dari prioritas kebijakan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Adapun pada Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2015 – 2019 Pemerintah Kabupaten Lumajang, Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup untuk mendukung terwujudnya Misi ke-2 (kedua) yaitu meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat secara merata berbasis pertanian, pemberdayaan UMKM dan jasa pariwisata serta usaha pendukungnya dengan tujuan yang harus dicapai yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat melalui sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas Sarana Dasar Permukiman;

Guna mengukur capaian sasaran sebagaimana tersebut diatas maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran Meningkatkan Kualitas Sarana Dasar Permukiman indikator sasaran:

1. Persentase Rumah Tidak Layak Huni
2. Persentase Rumah Tangga (RT) Pengguna Air Bersih
3. Persentase Kawasan Kumuh
4. Persentase Ketersediaan Tempat Hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Guna mendukung keberhasilan Indikator kinerja utama diatas maka ditetapkan Program yang akan dilaksanakan sebagaimana berikut :

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 3) Program peningkatan disiplin aparatur
- 4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 5) Program pengembangan Perumahan
- 6) Program Lingkungan Sehat Perumahan
- 7) Program Lingkungan Sehat Permukiman
- 8) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
- 9) Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh

A.6. Matrik Hubungan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Tabel. 2.1.
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Misi (1)	Tujuan (2)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)
Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat secara merata berbasis pertanian, pemberdayaan UMKM dan jasa pariwisata serta usaha pendukungnya	1. Tingkat Kemiskinan 2. Indek GINI	Meningkatnya Kualitas Sarana Dasar Permukiman	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Infrastruktur Dasar

A.7. Strategik

Strategik adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program.

-) Kebijakan dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, Pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi

pemerintah. Adapun kebijakan Pemerintah daerah terhadap Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu:

- a. Meningkatkan pelayanan administrasi;
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur;
- c. Meningkatkan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh;
- d. Meningkatkan Pengembangan Perumahan;
- e. meningkatkan Lingkungan Sehat Perumahan;
- f. Meningkatkan Lingkungan Sehat Permukiman;
- g. Meningkatnya Pemberdayaan Komunitas Perumahan

) Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Adapun program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah dijabarkan dalam rencana strategis 2015-2019 adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan;
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
- e. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- f. Program Pengembangan Perumahan;
- g. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
- h. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan;
- i. Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh

Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaan baik melalui APBN/APBD, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat.

B. Rencana Kerja Tahunan 2017

Uraian prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kemudian diturunkan dalam penentuan target kinerja untuk pencapaian sasaran jangka pendek (tahunan). Ini bisa dimaknai bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis seperti pencapaian target jangka menengah 5 tahunan. Tabel di bawah ini berisi indikator dan target kinerja untuk setiap sasaran pada tahun 2017. Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur.

Tabel. 2.2.
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2017

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Satuan (3)	Target (4)
Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Perumahan dan Permukiman serta Prasarana Sarana utilitas Umum (PSU)	1. Presentase Rumah Tidak Layak Huni	%	9,73
	2. Persentase Kawasan Kumuh	%	45,05
	3. Persentase Ketersediaan Tempat Hunian	%	100

Pencapaian sasaran di dalam Rencana Kerja Tahunan tersebut dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan selama tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel. 2.3.
Program dan Kegiatan Pencapaian Sasaran Tahun 2017

Sasaran Strategis	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Perumahan dan Permukiman serta Prasarana Sarana utilitas Umum (PSU)	9	29

Rencana kinerja tahunan merupakan hasil dari proses pengintegrasian antara perencanaan strategis dengan penganggaran. Penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan pembangunan.

Penyusunan perencanaan kerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Berikut ini perjanjian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2017 :

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Satuan (3)	Target (4)
Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Perumahan dan Permukiman serta Prasarana Sarana utilitas Umum (PSU)	Presentase Rumah Tidak Layak Huni	%	9,73
	Persentase Kawasan Kumuh	%	45,05
	Persentase Ketersediaan Tempat Hunian	%	100